

Inkonsistensi Amerika dalam Ajaran Perdagangan Bebas

KONSEP

Perdagangan bebas merupakan cetusan dari pemikiran ekonom kaum klasik, terutama dipelopori Adam Smith dan David Ricardo. Kedua ekonom klasik tersebut mengoreksi pakem berpikir kaum markantilisme yang menjalankan praktek perdagangan proteksionisme. Kaum markantilisme menganggap bilamana negara (kerajaan) hendak makmur maka diperlukan dua model kebijakan secara bersamaan, yakni mendorong ekspor sebesar-besarnya dan membatasi impor secara ketat dari negara lain agar negara yang bersangkutan memiliki alat pembayaran (uang) yang banyak.

Alhasil dalam menjalankan praktek proteksionisme, negara yang menganut paham merkantilisme hasil kekayaan mereka gunakan membeli persenjataan untuk menekan negara-negara lain. Smith beranggapan bahwa cara berpikir kaum markantilisme tidak relevan, sebab ukuran kemakmuran suatu bangsa bukan ditentukan oleh banyaknya alat pembayaran yang dimilikinya, tetapi diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) dan seberapa besar sumbangan ekspor terhadap PDB.

suatu produk ditentukan oleh produktifitas tenaga kerja (efisiensi), dimana suatu negara akan dapat melakukan ekspor dan menguasai pasar bila tenaga kerjanya efisien yang kemudian hari disebut keunggulan komparatif (comparative advantage).

Kedua teori ini setidaknya menjadi landasan berkembangnya pemikiran liberalisme ekonomi dan perdagangan bebas, meskipun sistem liberalisme sebetulnya dapat menjadi mitos, karena pada akhirnya sistem liberalisme tidak dapat menghadang badai krisis ekonomi yang menghantam dunia pada tahun 1930-an.

Dibalik krisis, muncul gagasan baru yang dikembangkan oleh John Meynard Keynes (seorang ekonom dan Menteri Keuangan Inggris) pada saat itu dengan mengambil "jalan tengah" dengan tidak menolak liberalisme ekonomi namun dibutuhkan kehadiran pemerintah bilamana ekonomi mengalami turbulensi. Esensi dari pemikiran ini, yakni pentingnya peran pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja (full employment).

Lewat kebijakan politik negara-negara maju dan institusi moneter seperti IMF, Bank Dunia dan WTO, mereka menggunakan lembaga-lembaga tersebut memaksakan penggunaan kembali paham liberalisme gaya baru (neo-liberalisme). Praktek neo liberalisme, terutama dipelopori oleh Amerika (masa pemerintahan Reagan) dan Inggris (Teatcher) menghendaki perdagangan bebas dengan meniadakan hambatan yang diterapkan pemerintah (proteksionisme) dalam perdagangan antar individual dan perusahaan antar negara, yang kemudian lahirlah World Trade Organization (WTO) untuk mengatur perdagangan internasional, prinsip pengaturannya tidak boleh diskriminatif, mengatur sistem keterbukaan perdagangan.

Perang Dagang AS - China Tak Ada Untungnya

Mencermati perkembangan ekonomi global saat ini, praktek liberalisme ekonomi telah dijalankan oleh berbagai negara, termasuk negara komunis pun menjalankannya seperti China. Sekalipun --Negeri Tirai Bambu-- ini masih menjalankan ideologi komunisme dalam politik namun sistem ekonominya sangat liberal.



Untuk meningkatkan PDB maka kegiatan ekonomi sedapat mungkin intervensi pemerintah dibatasi sehingga terbangun mekanisme pasar (perdagangan bebas), adanya perdagangan bebas akan melahirkan kompetisi (persaingan) yang membutuhkan efisiensi dan spesialisasi dengan memanfaatkan keunggulan absolut (absolute advantage). Belakangan konsep keunggulan ini disempurnakan oleh Ricardo dengan menekankan pada nilai tenaga kerja, bahwa harga

Konsep ini kemudian digunakan oleh Presiden Amerika, Roosevelt dalam kebijakan new deal dan nyatanya ekonomi negara-negara yang mengadopsi gagasan itu mengalami pertumbuhan dan kemakmuran yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan transnasional terus tumbuh di negara-negara maju, modal mereka makin kuat. Hanya saja perusahaan-perusahaan transnasional dalam perkembangannya menginginkan agar intervensi pemerintah perlu dibatasi, dengan menguatnya kekuatan modal mereka makin meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk melepaskan kegiatan ekonomi ke mekanisme pasar.

Alhasil ekonomi China dalam tiga dekade mengalami kemajuan yang sangat pesat, China melaju menyalip negara-negara maju lainnya dalam hal pembangunan ekonomi. Bahkan China sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia yang terus membuntuti ekonomi Amerika, dan memiliki cadangan devisa terbesar dunia sebesar US\$ 3,14 triliun per 2017. Bahkan berbagai survey memprediksi sekitar tahun 2030 China akan menjadi raksasa ekonomi dunia melampaui USA, prediksi tersebut bukan tanpa

alasan, sekalipun tidak lagi tumbuh ekonominya double digit.

Makin pesatnya perkembangan ekonomi China tidak dapat dielakkan mereka akan melakukan ekspansi ideologi dan penguasaan sumber daya ekonomi di negara-negara lain, tidak terkecuali Amerika sendiri, sebab China selama ini merupakan investor asing terbesar pemegang surat berharga pemerintah AS. Per 2017, kepemilikan China di obligasi negara AS mencapai US\$ 1,19 triliun. Nilai perdagangan China pun terus membengkak, kinerja ekspor mereka mencapai US\$ 422,5 miliar sepanjang 2017, implikasinya kemudian neraca perdagangan antara China - Amerika makin menganga (defisit).

Defisit neraca perdagangan antara AS-China mencapai US\$ 337,18 miliar, meningkatnya defisit perdagangan AS terhadap China membuat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempuh kebijakan yang sangat tidak populis dengan melakukan praktek proteksionisme dalam bentuk pengenaan tarif beberapa produk China, seperti aluminium dan baja yang masuk ke Amerika. Malahan Trump berniat mengenakan tarif USD 50 miliar untuk barang China.

Trump bahkan mengancam menambah tarif impor USD 100 miliar buat barang lainnya. Alasan Trump menempuh kebijakan pengenaan tarif produk China karena ia menganggap perdagangan Amerika Serikat mengalami defisit yang terus membengkak dan potensi kekayaan intelektual Amerika dicuri oleh China sekitar USD 300 miliar.

Pengenaan tarif produk China oleh pemerintah Amerika tak pelak mendorong China melakukan pembalasan dengan mengenakan tarif sebesar 25 persen untuk 128 produk, terutama produk-produk pertanian (termasuk daging babi beku, wine, buah-buahan dan kacang-kacangan), mobil dan pesawat yang diimpor dari Amerika. Kegaduhan perdagangan itu tentu tidak ada yang diuntungkan, malahan perang dagangan ini "pelurunya" akan menyasar kemana-mana.

Pada saat yang bersamaan kebijakan Trump tentu saja tidak serta merta membangkitkan rasa nasionalisme orang-orang Amerika, terbukti para petani kedelai negara bagian Nebraska resah dan sebagian politisi pihak oposisi memanfaatkan momentum ini untuk menekan Trump agar kebijakan tarif impor dibatalkan, penyebabnya impor kedelai Amerika dihentikan oleh China

dan mengalihkan pembeliannya ke Brazil. Selama ini tujuan ekspor kedelai Amerika paling besar ke China mencapai sekitar 7 juta ton setiap tahunnya.

Bahkan selama bertahun-tahun secara finansial produk pertanian AS meraup sekitar US\$20 miliar atau sekitar Rp. 278 triliun dari penjualan ke Cina. Produk ini berupa kedelai, jagung, gandum, sorgum, daging babi dan daging sapi. Dipihak China tentu pun mengalami kerugian, sebab produk industri manufaktur seperti industri teknologi, permesinan, kedirgantaraan, peralatan medis, obat-obatan dan material pendidikan akan dikenakan tarif sehingga harga produk-produk tersebut akan mahal dan sulit bersaing di pasar Amerika.

Persoalannya, ekspor barang yang dijalankan oleh kedua negara tersebut merupakan produksi negara lain yang berbasis di Amerika maupun di China yang terkena imbas, maka pada akhirnya perang dagang itu tidak ada yang diuntungkan. Sekaligus ajaran perdagangan bebas yang dipelopori oleh Amerika Serikat selama ini pelurunya menyasar ke mereka sendiri (senjata makan tuan), sekaligus memperlihatkan inkonsistensi Amerika terhadap ajaran liberalisme perdagangan.

Amerika terkenal dengan praktek dagang imbalance, menuntut negara lain membuka pasar selebar-lebarnya atas produk mereka, namun menjalankan praktek proteksionisme dilain sisi.

**Penulis Adalah
Pengajar Fakultas
Ekonomi UNG**